

***THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION, REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE,
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ON ECONOMIC GROWTH AND HUMAN***

DEVELOPMENT INDEX AS INTERVENING VARIABLES

(EMPIRE STUDY ON REGENCY/CITY GOVERNMENT IN

JAMBI PROVINCE 2016-2019)

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS

DAN EFISIENSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA DI

PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2019)

Oleh:

Ira Sri Adipura¹⁾ Sri Rahayui²⁾ Junaidi³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2002, Jambi – Indonesia

^{2&3)}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia

Email : sriadipura@gmail.com¹⁾, sri_rahayu@unja.ac.id²⁾, junaidi@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of fiscal decentralization, local financial independence, effectiveness and efficiency on economic growth with the Human Development Index as an intervening variable. The research sample is districts/cities in Jambi province, using secondary data from the Indonesian Central Bureau of Statistics for the period 2016 to 2019. Data analysis was carried out using path analysis with the SPSS program. The results of the analysis indicate that, first, fiscal decentralization, Regional Financial Independence and Effectiveness have an effect on Economic Growth, but Efficiency has no effect on Economic Growth. Fiscal Decentralization and Efficiency through the Human Development Index have no effect on economic growth. And the Ministry of Regional Finance and Effectiveness through the Human Development Index has an effect on Economic Growth.

Keywords: Fiscal decentralization, Regional Financial Independence, Effectiveness, Efficiency, economic growth, Human Development Index.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh antara desentralisasi fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Sampel penelitian adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dengan menggunakan data sekunder dari Biro Pusat Statistik Indonesia periode 2016 sampai dengan 2019. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur dengan program SPSS. Hasil analisis mengindikasikan bahwa, pertama, desentralisasi fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, namun Efisiensi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi melalui Indeks Pembangunan Manusia Tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas melalui Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci: Desentralisasi fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokratisasi yang berkembang dalam kehidupan berbangsadan bernegara, dalam mewujudkan komitmen pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good governance* yang menjadi faktor utama dalam memberdayakan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah wujud dari desentralisasi sebagai hasil demokratisasi, Desentralisasi berguna untuk menumbuhkan kiat pemerintah dalam dalam memfasilitasi kebutuhan dan aspirasi daerah sesuai dengan keberagaman masing-masing daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah dibutuhkan guna menumbuhkan kegiatan lokal, sesuai dengan berbagai kondisi dari setiap Kabupaten/Kota. Melalui desentralisasi, setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong aktivitas guna meningkatkan sumber pendapatan, serta peningkatan kemampuan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 pasal 8, menyebutkan terkait APBD yang disusun dengan menerapkan pendekatan kinerja. pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pencapaian *output* maksimal hal yang harus di kedepankan adalah dengan melakukan pendekatan kinerja melalui perencanaan dan alokasi biaya ataupun *input* yang ditetapkan. Analisis Kinerja keuangan APBD setiap tahunnya dianalisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai setiap tahunnya dengan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Penyelenggaraan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau melaksanakan konsep *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. pengurus suatu daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia, namun sumber daya ekonomi merupakan hal penting berupa keuangan, yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah (Wahab, 2016).

Rendahnya kapasitas atau kemampuan daerah dalam mengelola keuangan akan memicu munculnya efek negatif yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat, Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai sumber daya alam yang tinggi hingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten/Kota.

Kondisi kinerja keuangan yang berfluktuasi hingga dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang juga mengalami fluktuasi hampir disetiap tahunnya, hal ini menunjukkan ketimpangan pertumbuhan antar daerah, makroekonomi yang tidak stabil diakibatkan

olehrendahnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang menimbulkan efek negatif bagi pemerintahan yaitu menurunnya pelayanan hingga mampu menurunkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia, namun hal ini tidak sejalan dengan data statistik yang menunjukkan peningkatan IPM hingga berada pada kategori sedang dan kategori tinggi. Jika desentralisasi fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi dikatakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan maka hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui data statistik Indeks Pembangunan Manusia.

Kumpungpune et al., (2021) Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehwat dan Giri (2019) menyatakan bahwa terdapat integrasi antara perkembangan keuangan terhadap perekonomian di India, hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan keuangan berdasarkan statistik memiliki pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya dapat menunjang kinerja perekonomian di India.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap terhadap PDRB Rill Per Kapita?
2. Apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB Rill Per Kapita?
4. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
5. Apakah Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap PDRB Rill Per Kapita?
6. Apakah Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pemabngunan Manusia?
7. Apakah Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap PDRB Rill Per Kapita?
8. Apakah Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
9. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap PDRB Rill Per Kapita?
10. Apakah Desentralisasi Fiskal secara tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?
11. Apakah kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?

12. Apakah efektivitas secara tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?
13. Apakah efisiensi secara tidak langsung berpengaruh terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap terhadap PDRB Riil Per Kapita
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap PDRB Riil Per Kapita
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia
5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efektivitas terhadap PDRB Riil Per Kapita?
6. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia
7. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efisiensi terhadap PDRB Riil Per Kapita
8. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efisiensi terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
9. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB Riil Per Kapita?
10. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Desentralisasi Fiskal secara tidak langsung terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia
11. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia
12. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efektivitas secara tidak langsung terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia
13. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Efisiensi secara tidak langsung terhadap PDRB Riil Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan sebuah kinerja kenaikan output perkapita secara terus menerus dalam waktu yang cukup panjang dan menjadi salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan suatu daerah, tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

Sistem ekonomi dalam pembangunan ekonomi merupakan serangkaian ari usaha melalui kebijakan yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup pada suatu masyarakat, meningkatkan peluang lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan pada masyarakat, memperluas hubungan ekonomi secara regional serta melalui pergeseran pada kegiatan perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder. Mengusahakan agar pendapatan masyarakat pada suatu daerah mengalami peningkatan merupakan arah dan tujuan dari pembangunan ekonomi. Melalui Penyajian statistik secara berkala pendapatan dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi pendapatan masyarakat yang dapat digunakan menjadi bahan perencanaan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan Nasional atau Daerah dibidang ekonomi.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan pengukuran dari perbandingan harapan hidup, pendidikan serta standar hidup untuk setiap negara seluruh dunia. Pengklasifikasian HDI digunakan untuk mengetahui apakah sebuah negara dapat dikategorikan negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang serta kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup akan mudah diukur. Apabila kebutuhan akan pelayanan dan ketersediaan kebutuhan publik dapat terpenuhi maka masyarakat akan merasa diperhatikan dan nyaman hingga mampu menjlankan setiap kegiatan dengan efisien.

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Ali (2017) menyatakan Desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh sebab itu, peranan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan kinerja dari keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini dengan melihat rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sabilla (2014) menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi per kapita regional diseluruh Provinsi di Indonesia.

Desentralisasi fiskal bisa mendorong pemerintahan ke arah yang tidak stabil, pada masanya akan menghambat pertumbuhan perekonomian, karena desentralisasi fiskal bisa menurunkan pengeluaran dan

pajak yang berbasis kepada pemerintah pusat dapat menjadi fungsi stabilitasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Saputra (2012) yang menyatakan Desentralisasi Fiskal lebih condong berdampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian.

Suwandi (2016) Desentralisasi akan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik akan tercipta efisiensi dalam perekonomian, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Kusufi (2012) menyatakan kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Adanya bentuk keingintahuan masyarakat terkait kinerja keuangan, pemerintah daerah harus memberikan penjelasan dan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

Andriyani (2020) menyatakan bahwa penilaian kinerja sebaiknya mampu menunjukkan informasi secara transparan kepada masyarakat sehingga kinerja keuangan dapat ikut dikontrol oleh masyarakat. Untuk menunjukkan dan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, pertanggungjawaban atas laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan secara tersusun dan tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.

Suryaningsih (2015) Rasio atas kemandirian keuangan daerah merupakan sebuah pengukuran terhadap kinerja keuangan daerah yang mampu mencerminkan dan memberi gambaran terkait kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai sendiri kegiatan dari pemerintah, dan pelayanan terhadap masyarakat daerah.

2.1.4 Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu kegiatan pada sektor publik sehingga dapat dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan oleh pemerintah daerah. Rasio efektivitas adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah daerah dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Halim (2011) rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.

Andriyani (2020) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan berdasarkan potensi rill masing-masing daerah. Semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan PAD maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar dan begitu pula sebaliknya. Apabila daerah telah menggunakan PAD secara efektif maka akan semakin tinggi rasio

efektivitas daerah dalam memenuhi biaya program kerja dalam upaya peningkatan perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

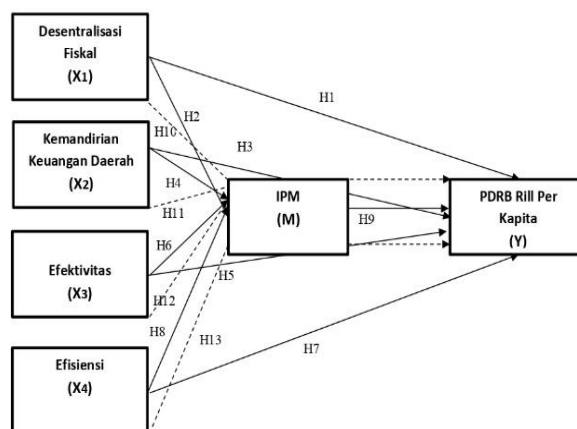
2.1.5 Efisiensi

Kamus Besar Ekonomi (2003) Efisiensi adalah hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (*output*) barang dan jasa dengan masukan (*input*) yang langka didalam suatu unit kerja ataupun ketetapan dalam menjalankan suatu dengan tidak membuang-buang waktu dan biaya. Pengukuran tingkat efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dianggarkan dan membandingkan dengan *output* yang dihasilkan yang menggunakan data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah, semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pendapatan maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Andriyani (2020) Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur *input* digunakan dan membandingkan dengan *output* yang dihasilkan. Hal ini memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Apabila rasio yang dihasilkan semakin kecil maka menunjukkan semakin efisien suatu kegiatan tersebut. Begitu pula sebaliknya apabila rasio yang dihasilkan besar maka semakin tidak efisien kegiatan tersebut.

2.2. Model Penelitian

Adapun model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Gambar 1. Model Penelitian

2.3. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita.

- H2 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- H3 : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita.
- H4 : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- H5 : Efektivitas berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita.
- H6: Efektivitas berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- H7: Efisiensi berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita.
- H8: Efisiensi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- H9: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap PDRB Rill Per Kapita.
- H10: Terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia.
- H11: Terdapat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia.
- H12: Terdapat pengaruh efektivitas terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia.
- H13: Terdapat pengaruh efisiensi terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kuantitatif. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik(BPS) dan DJPKemenkeu.

3.2. Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen adalah Desentralisasi Fiskal, Kemandirian keuangan daerah, Efektivitas dan Efisiensi. variabel dependen dalam penelitian adalah Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Intervening dalam penelitian ini adalah ndeks Pembangunan Manusia.

3.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis jalur (*pathanalysis*). Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang sobel test.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, nilai maksimum, dan rata-rata sampel. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. sedangkan variabel independen yaitu Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah. Tabel berikut ini adalah deskriptif data yang diperoleh:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Standar Deviasi
Desentralisasi Fiskal	44	3	26	8,52	5,000
Kemandirian Keuangan	44	5	43	13,25	9,801
Efektivitas	44	41	183	105,54	27,159
Efisiensi	44	66	115	94,89	9,841
Pertumbuhan Ekonomi	44	2,65	6,84	4,9411	,93380
IPM	44	61,88	78,26	69,4702	3,61597

Sumber: Data diolah peneliti 2021

- Desentralisasi Fiskal
Variabel Desentralisasi Fiskal memiliki nilai minimum 3; nilai maksimum 26. nilai rata-rata Desentralisasi Fiskal sebesar 8,52. Nilai rata-rata menunjukkan seberapa besar Desentralisasi Fiskal secara keseluruhan. Nilai standar deviasi sebesar 5,000. Nilai standar deviasi yang masih cukup tinggi menunjukkan selisih nilai data Desentralisasi Fiskal masih besar. Hal ini dapat dijelaskan dari rumus perhitungan Desentralisasi Fiskal yang merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.
- Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mendanai sendiri kegiatan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah paling rendah (*min*) sebesar 5% terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2018. Tingkat kemampuan mendanai sendiri kebutuhan pemerintahan tertinggi (*max*) dalam menjalankan otonomi daerah sebesar 43% terjadi pada Kabupaten Kerinci Tahun 2016. Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 13.25 dengan standar deviasi 9,801.
- Efektivitas
Efektivitas yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola PAD sesuai dengan yang telah dianggarkan paling rendah (*min*) sebesar 41% terjadi pada Kabupaten Kerinci Tahun 2019. Tingkat kemampuan dalam mengelola PAD tertinggi (*max*) terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2017. Rata-rata efektivitas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 105.64 dengan standar deviasi 27,159.
- Efisiensi

Efisiensi yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan dengan melihat output yang dihasilkan. Rasio ini dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila rasio ini kecil, dalam hal ini tingkat terendah (*min*) sebesar 66% terjadi pada Kabupaten Tebo Tahun 2019 hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Tingkat kemampuan dalam dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan rasio yang tinggi (*max*) senilai 115% terjadi pada Kabupaten Sarolangun 2019. Rata-rata efisiensi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 94.89 dengan standar deviasi 9,841.

- e) **Pertumbuhan Ekonomi**
 Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan nyata dari perekonomian per kapita penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan nilai terendah (*min*) sebesar 2,65% terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016. Tingkat pertumbuhan perekonomian tertinggi (*max*) senilai 6,84% terjadi pada Kota Jambi Tahun 2016. rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 4,9441 dengan standar deviasi 0,93380.
- f) **Indeks Pembangunan Manusia**
 Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam upaya memperoleh pendapatan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan nilai terendah (*min*) sebesar 61,88% terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016. Tingkat pertumbuhan perekonomian tertinggi (*max*) senilai 78,26% terjadi pada Kota Jambi Tahun 2019. rata-rata indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 69,4702 dengan standar deviasi 3,61597.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Pengujian Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 2. Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N	44	444
Test Statistic	,078	,120
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}	,114 ^c

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas nilai Asymp.sig yang lebih besar dari 0,05, sehingga data penelitian ini telah berdistribusi normal.

4.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Model uji regresi yang baik selanjutnya tidak terjadi Multikolinieritas

yang dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF).

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Desentralisasi Fiskal	,426	2,345
Kemandirian Keuangan	,416	2,403
Efektivitas	,932	1,073
Efisiensi	,858	1,165

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Hasil perhitungan multikolinieritas menunjukkan variabel – variabel dalam penelitian memiliki nilai *tolerance* sebagai berikut. Variabel independen Desentralisasi Fiskal 0,426; Variabel independen Kemandirian Keuangan Daerah 0,416; Variabel independen Efektivitas 0,932; Variabel independen Efisiensi 0,858. Nilai *tolerance* semua variabel lebih 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel – variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut. Variabel independen Desentralisasi Fiskal 2,345; Variabel independen Kemandirian Keuangan Daerah 2,403; Variabel independen Efektivitas 1,073; Variabel independen Efisiensi 1,165. Nilai *tolerance* semua variabel lebih 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model.

4.2.3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan.

Tabel 4. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Model	t	Sig.
Desentralisasi Fiskal	,411	,683
Kemandirian Keuangan	,859	,390
Efektivitas	,039	,959
Efisiensi	-,557	,581

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Hasil perhitungan heterokedastisitas menunjukkan variabel – variabel dalam penelitian memiliki nilai sig sebagai berikut. Variabel independen Desentralisasi Fiskal 0,683; Variabel independen Kemandirian Keuangan Daerah 0,390; Variabel independen Efektivitas 0,959; Variabel independen Efisiensi 0,581. Nilai sig semua variabel lebih 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Persamaan yang baik adalah yang tidak memiliki autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai

prediksi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Tabel 5. Hasil Pengujian Autokorelasi

	Persamaan I	Persamaan II
N	44	444
Asymp. Sig. (2-tailed)	,352	,170

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Hasil Uji Autokorelasi dengan Run test seperti yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf 0,05 yaitu senilai 0,3521 dan 0,170 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Analisis Jalur

Analisis jalur digunakan untuk menyelesaikan model penelitian yang menggunakan variabel *intervening*. Analisis jalur memungkinkan kita untuk menguji hubungan langsung antar variabel maupun hubungan tidak langsung antar variabel dalam model. Evaluasi model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel dengan bantuan software SPSS 23.0.

4.3.1 Persamaan Jalur Pertama

Model persamaan yang pertama adalah pengaruh Desentralisasi Fiskal, Keandirian keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensiterhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berikut hasil analisis jalur I yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 6. Analisis Jalur I

Model	Standardized Coefficients
	B
(Constant)	74.838
Desentralisasi Fiskal	-,917
Kemandirian Keuangan Daerah	1,620
Efektivitas	-,441
Efisiensi	-,020

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Hasil analisis jalur seperti yang disajikan pada tabel 6 di atas menunjukkan persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$M = 74,838 - 0,917X_1 + 1,620X_2 - 0,441X_3 - 0,020X_4$$

Keterangan:

- M : Indeks Pembangunan Manusia
 X₁ : Desentralisasi Fiskal
 X₂ : Kemandirian keuangan Daerah
 X₃ : Efektivitas
 X₄ : Efisiensi

Persamaan jalur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Konstanta sebesar 74,838 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari keempat variabel independen

Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi serta faktor lain, maka variabel Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 74,838 satuan.

- b) Koefisien regresi variabel Desentralisasi Fiskal bernilai -0,917 (negatif). Arah negatif pada hubungan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa perubahan pada Desentralisasi Fiskal berbalik arah dengan perubahan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Desentralisasi Fiskal sebesar satu satuan, maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar sebesar 0,917 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
- c) Koefisien regresi variabel Kemandirian Keuangan Daerah bernilai 1,620. Arah positif pada hubungan antara Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa perubahan pada Kemandirian Keuangan Daerah searah dengan perubahan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar satu satuan, maka akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar sebesar 1,620 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
- d) Koefisien regresi variabel Efektivitas bernilai -0,441 (negatif). Arah negatif pada hubungan antara Efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa perubahan pada Efektivitas tidak searah dengan perubahan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Efektivitas sebesar satu satuan, maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar sebesar 0,441 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
- e) Koefisien regresi variabel Efisiensi -0,020 (negatif). Arah negatif pada hubungan antara Efisiensi terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa perubahan pada Efisiensi tidak searah dengan perubahan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Efisiensi sebesar satu satuan, maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar sebesar 0,020 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

4.3.2 Persamaan Jalur Kedua

Model persamaan yang kedua adalah pengaruh Desentralisasi Fiskal, Keandirian keuangan Daerah, Efektivitas, Efisiensi dan Indeks Pembangunan Manusiaterhadap PDRB Rill Per Kapita. Berikut hasil analisis jalur II yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 7. Analisis Jalur II

Model	Standardized Coefficients
	B
(Constant)	-19,315
Desentralisasi Fiskal	2,272
Kemandirian Keuangan Daerah	-2,711
Efektivitas	,423
Efisiensi	-,140
Indeks Pembangunan Manusia	,540

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Hasil analisis jalur seperti yang disajikan pada tabel 7 di atas menunjukkan persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -19,315 + 2,272X_1 - 2,711X_2 + 0,423X_3 - 0,140X_4 + 0,540M$$

Keterangan:

- Y : PDRB Rill Per Kapita
- X₁ : Desentralisasi Fiskal
- X₂ : Kemandirian keuangan Daerah
- X₃ : Efektivitas
- X₄ : Efisiensi
- M : Indeks Pembangunan Manusia

Persamaan jalur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Konstanta sebesar -19,315 menyatakan menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari kelima variabel independen Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas, Efisiensi dan Indeks Pembangunan Manusia serta faktor lain, maka variabel PDRB Rill Per Kapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menurun sebesar 19,315 satuan.
- b) Koefisien regresi variabel Desentralisasi Fiskal bernilai 2,272. Arah positif pada hubungan antara Desentralisasi Fiskal terhadap PDRB Rill Per Kapita menunjukkan bahwa perubahan pada Desentralisasi Fiskal berbalik arah dengan perubahan PDRB Rill Per Kapita. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Desentralisasi Fiskal sebesar satu satuan, maka akan menurunkan PDRB Rill Perkapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar sebesar 2,272 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
- c) Koefisien regresi variabel Kemandirian Keuangan Daerah bernilai 2,711. (Negatif) Arah negatif pada hubungan antara Kemandirian Keuangan Daerah terhadap PDRB Rill Per Kapita menunjukkan bahwa perubahan pada Kemandirian Keuangan Daerah searah arah dengan perubahan PDRB Rill Per Kapita. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan PDRB Rill Perkapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar sebesar 2,711 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
- d) Koefisien regresi variabel Efektivitas bernilai 0,423. Arah positif pada hubungan antara

- Efektivitas terhadap PDRB Rill Per Kapita menunjukkan bahwa perubahan pada Efektivitas tidak searah dengan perubahan PDRB Rill Per Kapita. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Efektivitas sebesar satu satuan, maka akan menurunkan PDRB Rill Perkapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar sebesar 0,423 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
- e) Koefisien regresi variabel Efisiensi bernilai -0,140 Arah negatif pada hubungan antara Efisiensi terhadap PDRB Rill Per Kapita menunjukkan bahwa perubahan pada Efisiensi searah dengan perubahan PDRB Rill Per Kapita. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Efisiensi sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan PDRB Rill Perkapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar sebesar 0,140 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
 - f) Koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia bernilai 0,540 Arah positif pada hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB Rill Per Kapita menunjukkan bahwa perubahan pada Indeks Pembangunan Manusia tidak searah dengan perubahan PDRB Rill Per Kapita. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar satu satuan, maka akan menurunkan PDRB Rill Perkapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar sebesar 0,540 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji F

Hasil uji F pengaruh variabel Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 8. Hasil Uji F

Keterangan	Fhitung	Sig.
Analisis Jalur I	3,013	0,019
Analisis Jalur II	19,595	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Hasil uji F pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung untuk analisis jalur I sebesar 3,013 dan nilai signifikansi sebesar 0,019 < 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa kelayakan model analisis jalur I terpenuhi. Nilai Fhitung untuk analisis jalur II sebesar 19,595 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa kelayakan model analisis jalur II juga terpenuhi.

4.4.2 Uji t

Hasil uji t pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 9. Hasil Uji t

Hipotesis	Pengaruh Antar Variabel			Sig.
	Variabel Independen	Terhadap	Melalui Variabel Dependen	

H1	Desentralisasi Fiskal	→		PDRB Rill Per Kapita	.038
H2	Desentralisasi Fiskal	→		IPM	.223
H3	Kemandirian Keuangan Daerah	→		PDRB Rill Per Kapita	.017
H4	Kemandirian Keuangan Daerah	→		IPM	.034
H5	Efektivitas	→		PDRB Rill Per Kapita	.010
H6	Efektivitas	→		IPM	.000
H7	Efisiensi	→		PDRB Rill Per Kapita	.283
H8	Efisiensi	→		IPM	.825
H9	IPM	→		PDRB Rill Per Kapita	.010
H ₁₀	Desentralisasi Fiskal	→	IPM	PDRB Rill Per Kapita	.131
H ₁₁	Kemandirian Keuangan Daerah	→	IPM	PDRB Rill Per Kapita	.002
H ₁₂	Efektivitas	→	IPM	PDRB Rill Per Kapita	.000
H ₁₃	Efisiensi	→	IPM	PDRB Rill Per Kapita	.747

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Pengaruh langsung variabel Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, efektivitas dan Efisiensi terhadap PDRB Rill Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia.

- Pengaruh langsung Desentralisasi Fiskal terhadap PDRB Rill Per Kapita memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig.) $0,038 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
- Pengaruh langsung Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig.) $0,223 > 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pemabangunan Manusiadi Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
- Pengaruh langsung Kemandirian keuangan daerah PDRB Rill Per Kapita memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig.) $0,017 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
- Pengaruh langsung Kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia memiliki

hasil analisis regresi linear signifikan (sig.) $0,034 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerahberpengaruh secara langsung terhadapIndeks Pemabangunan Manusiadi Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.

- Pengaruh langsung Efektivitas terhadap PDRB Rill Per Kapita memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig.) $0,010 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitasberpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
- Pengaruh langsung Efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig.) $0,000 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitasberpengaruh secara langsung terhadapIndeks Pemabangunan Manusia di Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
- Pengaruh langsung Efisiensi terhadap PDRB Rill Per Kapita memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig.) $0,283 > 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa Efisiensitidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
- Pengaruh langsung Efisiensi terhadap Indeks Pembangunan Manusia memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig.) $0,825 > 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa Efisiensi tidakberpengaruh secara langsung terhadapIndeks Pemabangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.
- Pengaruh langsungIndeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB Rill Per Kapita memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig.) $0,010 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusiaberpengaruh secara langsung terhadap PDRB Rill Per Kapita di Kabupaten Kota provinsi Jambi Tahun 2016 sampai dengan 2019.

Pengaruh Tidak Langsung Variabel Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi terhadap PDRB Rill Per Kapita Melalui Indeks Pembangunan Manusia

- Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig) $0,131 > 0,05$. Hipotesisi yang menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh negatif terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia ditolak.
- Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig) $0,020 < 0,05$. Hipotesis yang menyatakan bahwa Kemandirian

- Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia diterima.
- c) Efektivitas berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig) $0,000 < 0,05$. Hipotesis yang menyatakan bahwa efektivitas berpengaruh negatif terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia diterima.
 - d) Efisiensi berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia memiliki hasil analisis regresi linear signifikan (sig) $0,747 > 0,05$. Hipotesis yang menyatakan bahwa efisiensi tidak berpengaruh negatif terhadap PDRB Rill Per Kapita melalui Indeks Pembangunan Manusia ditolak.

4.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan dalam penelitian ini untuk melihat seberapa baik model yang digunakan. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R² Square* pada saat mengevaluasi mana model terbaik. Berikut ini hasil dari pengujian koefisien determinasi untuk PDRB Rill Per Kapita:

Tabel 10. Koefisien Determinasi

Keterangan	Persamaan I	Persamaan II
<i>Adjusted R Square</i>	0,573	0,293

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Tabel di atas hasil uji determinasi bahwa nilai *adjusted R square* menghasilkan nilai untuk persamaan I sebesar 0,573 yang mengandung arti bahwa 57,3% besarnya Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan oleh variabel Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan sisanya 42,7,7% ($100\% - 57,3\%$) lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Untuk persamaan II menghasilkan nilai sebesar 0,293 yang mengandung arti bahwa 29,3% besarnya PDRB Rill Per Kapita dapat dijelaskan oleh variabel Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia sedangkan sisanya 70,7% ($100\% - 29,3\%$) lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Faktor lain yang dapat memicu peningkatan PDRB Rill Per Kapita seperti belanja modal dan yang dapat memicu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia diantaranya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan dapat menjadi variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita. Yang berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dalam hal ini diproksi PDRB Rill Per Kapita. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola dan mengatur rumah tangga nya sendiri, dengan desentralisasi pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat di daerah nya.
- b) Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Desentralisasi fiskal yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap indeks pemabangunan manusia menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di kabupaten kota provinsi Jambi berada di jalur yang tidak baik. Pemerintah daerah di negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi dan lemahnya sumber daya manusia dalam mengelola anggaran.
- c) Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap PDRB Rill Per Kapita. Pengelolaan keuangan yang harus dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah menuntut adanya kemandirian daerah dalam menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya.
- d) Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya eksternal PAD yang meningkat akan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan ekstern pemerintah pusat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- e) Efektivitas berpengaruh terhadap PDRB rill per kapita. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. efektivitas PAD di kabupaten kota provinsi Jambi yang tergolong tinggi menunjukkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dilihat dari rasio efektivitas mampu menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
- f) Efektivitas berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pengertian efektivitas dalam hal ini erat kaitannya dengan derajat keberhasilan operasi pada sektor publik. rasio efektivitas yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

- g) Efisiensi tidak berpengaruh terhadap PDRB rill per kapita. Rasio efisiensi menunjukkan upaya daerah dalam memperoleh pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan yang dihasilkan, rasio efisiensi yang tergolong rendah menunjukkan daerah tidak mampu mengoptimalkan pendapatan sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terhambat.
- h) Efisiensi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Secara teori desentralisasi akan mendekatkan pemerintah pada masyarakat sehingga sistem pemerintahan yang sudah desentralistik akan tercapai tingkat efisien yang cukup tinggi, namun rasio efisien kabupaten kota di Provinsi Jambi tergolong sangat rendah sehingga pada gilirannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- i) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap PDRB Rill per kapita. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia akan semakin tinggi pula Pertumbuhan Ekonomi dalam hal ini diproksi PDRB rill perkapita merupakan perluasan kegiatan ekonomi adalah suatu cara untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru sehingga Pertumbuhan Ekonomi dapat tercapai.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

- a) Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi:
Perlunya penyesuaian pengelolaan keuangan daerah dalam era desentralisasi dengan prinsip efektivitas dan efisiensi sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan maksimal. Pemerintah daerah harus memastikan efisiensi pengeluaran daerah dan lebih berhati-hati dalam pola belanja daerah dan memaksimalkan potensi daerah masing-masing.
- b) Bagi dunia pendidikan dan peneliti selanjutnya
Model penelitian ini merupakan model kompleks, namun model penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi maupun faktor penghubung seperti belanja modal dan indikator kinerja keuangan yang lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M, and Maisyuri. 2017. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* 3(1).
- Kumpangpune, Noni, David P E Saerang, and Daisy S M Engka. 2021. "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota

Bitung." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 20(3): 60–77.

- Kusufi, Halim dan. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuri Andriyani, Mukhzarudfa, and Enggar Diah PA. 2020. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018)." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 5(2).
- Sabilla, K., and W. Jaya. 2014. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita di Indonesia." *JESP: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 15(1).
- Saputra, Bambang, and Mahmudi. 2012. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 16(2).
- Sehrawat, Madhu, and A. K. Giri. 2019. "Globalization, Role of Institutions and Economic Performance in Indian Economy: Empirical Evidence." *Journal of Financial Economic Policy* 11(1).
- Suryaningsih, Ni Nyoman, Made Suyana Utama, and I.N. Mahaendra Yasa. 2015. "Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 08.
- Suwandi, Kurni Adi, and Afrizal Tahar. 2016. "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta)." *InFestasi* 11(2).
- Wahab, A. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jambi." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*.